

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 322814 Fax. (0321) 328788 Website: <http://www.mojokertokab.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD**

**KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR 188.45 / 1640 / HK / 416 - 050 / 2021

**TENTANG**

**RENCANA KERJA ( RENJA ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan **Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** ) lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor **75, Tambahan** Lembaran Negara RI Nomor 3851 ), Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan **Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2003** Nomor 47 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang **Tahapan, Tata Cara** Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi **Pelaksanaan Rencana Pembangunan** Daerah;
4. Peraturan Pemerintah **Nomor 18 Tahun 2016** tentang **Perangkat** Daerah
5. Peraturan Daerah **Kabupaten** Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 **tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten** Mojokerto Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 — 2021 ( Lembaran Daerah **Kabupaten** Mojokerto Tahun 2019a Nomor 7 );

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2022.

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adala Renja Sekretariat DPRD;

KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

KEEMPAT : Ufaian Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal, 4 Nopember 2021

SEKRETARIS DPRD  
KABUPAT N MOJOKERTO



MARDIASIH, SH. MH.  
NIP. 19671020198903100

**RENCANA KERJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunannya secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua. Amin

## DAFTAR ISI

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar .....                                                                                     | i         |
| Daftar Isi .....                                                                                         | ii        |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                 | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                 | 3         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                              | 5         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                          | 5         |
| <b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>                                  | <b>8</b>  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu<br>dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 6         |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                    | 8         |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....                                            | 10        |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                            | 16        |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                              | 24        |
| <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                              | <b>25</b> |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                                                           | 25        |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                                      | 25        |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                                                           | 26        |
| <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...</b>                                        | <b>38</b> |
| <b>Bab V    PENUTUP .....</b>                                                                            | <b>42</b> |

## **BAB I**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh

pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
33. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ /416-050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.

### **13 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

### **BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2021. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **21. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 Per Semester II Tahun 2020 adalah:

##### **1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan

Kegiatan :

- a) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah 33,18%
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 44,18%
- c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 89,95%
- d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 97,42%
- e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 37,23%
- f) Penyediaan Makanan dan minuman. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 99,95%

- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 90%
- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 99,98%
- i) Penyediaan jasa tenaga kerja. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 96,31%

## 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Ruin/ Berkala Gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ oprasional, dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor.

Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100%.
- b) Pemeliharaan Ruin/ Berkala Gedung kantor. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 97,90%.
- c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ oprasional. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 96,03%
- d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor. Pencapaian Kinerja kegiatan ini adalah sebesar 59,66%

## 3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pencapaian kinerja program ini adalah persentase dokumen ASN yang mengikuti workshop sesuai tupoksi.

Kegiatan :

Workshop Rapat-rapat Koordinasi Sekretariat DPRD. Kinerja Kegiatan ini adalah sebesar 93,99 %

## 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pencapaian kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan:

Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan kinerja tahunan. Kinerja Kegiatan ini adalah sebesar 100 %

5. PROGRAM PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

Pencapaian kinerja prgram ini adalah Prosentase Perda yang disyahkan dan Persentase pemenuhan Kebutuhan DPRD sesuai Peraturan.

Kegiatan :

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 99,79%
- b) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 99,59%
- c) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggta DPRD. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 98,48%
- d) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD ke dalam dan luar daerah. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 99,55%
- e) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 92,77%
- f) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 71,96%
- g) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 88,87 %
- h) Rapat-rapat Paripurna. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 59,72%
- i) Kegiatan reses. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 83,90%
- j) Peringatan hari jadi Kabupaten Mojokerto. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 100 %
- k) Pidato Kenegaraan. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 89,32%
- l) General Cek Up bagi pimpinan dan Anggota DPRD. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 0%
- m) Peningkatan kerjasama infrmasi dengan mass media. Pencapaian Kinerja kegiatan ini sebesar 97,50%

Secara umum capaian kinerja dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan di atas rata-rata adalah hampir mencapai 93,69%. Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

Tabel.1.1. ( T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020

| Kode | Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan       | Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)              | Target kinerja capaian program (Rensra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021 | Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) |                                       |                        | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan |                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |                                                                       |                                                                      |                                                                          |                                                                           | target Renja Perangkat Daerah 2020                                 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020 | Tingkat Realisasi 2020 |                                                                | Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (n-1)      | Tingkat capaian realisasi target Renstra (n-1) |
| 1    | 2                                                                     | 3                                                                    | 4                                                                        | 5                                                                         | 6                                                                  | 7                                     | 8                      | 9                                                              | 10                                                                             | 11                                             |
|      |                                                                       |                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                                                    |                                       |                        |                                                                |                                                                                |                                                |
|      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber aya Air dan Listrik                | Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik      | 60                                                                       | 36                                                                        | 12                                                                 | 12                                    | 100%                   | 12                                                             | 60                                                                             | 100%                                           |
|      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan kendaraan Dinas/ Oprasional | Jumlah kendaraan operasional,perpajakan STNK,Pajak Kendaraan dan KIR | 60                                                                       | 38                                                                        | 12                                                                 | 12                                    | 100%                   | 12                                                             | 62                                                                             | 103%                                           |
|      | Penyediaan Alat Tulis kantor                                          | Jumlah Paket Penyediaan Alat tulis kantor                            | 12                                                                       | 9                                                                         | 3                                                                  | 3                                     | 100%                   | 2                                                              | 14                                                                             | 117%                                           |



|  | dan<br>prasarana<br>Aparatur                                             |                                                                                |     |    |    |    |      |    |     |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|-----|------|
|  | Pemeliharaan<br>Rutin/Berkala<br>Gedung<br>Kantor                        | Jumlah waktu<br>pemeliharaan<br>Gedung Kantor<br>sampai berfungsi<br>baik      | 60  | 36 | 12 | 12 | 100% | 12 | 60  | 100% |
|  | Pemeliharaan<br>Rutin/<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Dinas/<br>Operasional  | Jumlah waktu<br>pemeliharaan<br>Kendaraan dinas/<br>operasional                | 60  | 36 | 12 | 12 | 100% | 12 | 60  | 100% |
|  | pemeliharaan<br>Rutin/<br>Berkala<br>Peralatan<br>Gedung<br>Kantor       | Jumlah waktu<br>pemeliharaan<br>Peralatan Gedung<br>Kantor                     | 60  | 36 | 12 | 12 | 100% | 12 | 60  | 100% |
|  | Pengendara<br>an<br>Kendaraan<br>Operasional<br>Roda 2                   | Jumlah kendaraan<br>operasional roda 2<br>yg tersedia                          | -   | -  | -  | -  | 0%   | -  | -   | 0%   |
|  | <b>Program<br/>peningkata<br/>n disiplin<br/>aparatur</b>                |                                                                                |     |    |    |    |      | -  |     |      |
|  | Pengadaan<br>Pakaian<br>Dinas dan<br>Kelengkap<br>annya<br>(sekretariat) | Jumlah pakaian<br>dinas beserta<br>kelengkapannya<br>yang tersedia bagi<br>ASN | 150 | 90 | 30 | -  | 0%   | 30 | 120 | 80%  |
|  | Pengadaan<br>pakaian<br>khusus hari-<br>hari tertentu                    | Jumlah pakaian<br>khusus hari-hari<br>tertentu yang<br>tersedia bagi ASN       | 150 | 90 | 30 | -  | 0%   | 30 | 120 | 80%  |

|  | Program Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan                                      |                                                                                                              |     |     |    |    |      | -  | -   |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|------|----|-----|------|
|  | Workshop Rapat-rapat Koordinasi Sekretariat DPRD                                     | Jumlah workshop ASDEKSI yang diikuti ASN sesuai Tupoksi                                                      | 35  | 20  | 7  | 7  | 100% | 7  | 34  | 97%  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (DPRD)                                    | Jumlah DPRD yang mendapat Pakaian Dinas beserta kelengkapannya                                               | 150 | 100 | 50 | -  | 0%   | 50 | 150 | 100% |
|  | hearing/konsultasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Jumlah hearing/konsultasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama serta pengamanan | 40  | 24  | 8  | 8  | 100% | 8  | 40  | 100% |
|  | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan                                                   | Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan                                                                    | 125 | 74  | 25 | 22 | 88%  | 22 | 118 | 94%  |
|  | Rapat-rapat paripurna                                                                | Jumlah Rapat-rapat paripurna                                                                                 | 180 | 98  | 36 | 30 | 83%  | 36 | 164 | 91%  |
|  | Kegiatan reses                                                                       | Jumlah aspirasi masyarakat (Jumlah Kegiatan Reses)                                                           | 15  | 8   | 3  | 3  | 100% | 2  | 13  | 87%  |



|  |                                                                                          |                                                                                                 |    |    |    |    |      |    |    |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|----|----|------|
|  | Penyusunan Rencana Tahunan dan laporan Kinerja SKPD                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja yang akuntable                                   | 20 | 12 | 4  | 4  | 100% | 4  | 20 | 100% |
|  | <b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>                    |                                                                                                 |    |    |    |    |      | -  |    |      |
|  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                    | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas                                                  | 75 | 55 | 15 | 14 | 93%  | 15 | 84 | 112% |
|  | Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD                                                | Jumlah Kunter Pimpinan dan Anggota DPRD                                                         | 60 | 40 | 14 | 14 | 100% | 14 | 68 | 113% |
|  | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                                          | Jumlah Bimtek Kapasitas DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya                                  | 20 | 12 | 6  | 6  | 100% | 4  | 22 | 110% |
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD ke Luar dan Dalam Daerah | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam dan Luar Daerah | 60 | 40 | 14 | 14 | 100% | 14 | 68 | 113% |
|  | Penyusunan Raperda Bidang Komisi I                                                       | Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi I                                                        | 5  | 3  | 1  | -  | 0%   | 1  | 4  | 80%  |

|  |                                      |                                            |   |   |   |   |    |   |   |     |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|-----|
|  | Penyusunan Raperda Bidang Komisi II  | Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi II  | 5 | 3 | 1 | - | 0% | 1 | 4 | 80% |
|  | Penyusunan Raperda Bidang Komisi III | Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi III | 5 | 3 | 1 | - | 0% | 1 | 4 | 80% |
|  | Penyusunan Raperda Bidang Komisi IV  | Jumlah NA RancanganPerda Bidang Komisi IV  | 5 | 3 | 1 | - | 0% | 1 | 4 | 80% |

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel TC 30

Tabel 1.2. (T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

| No | Indikator                                                                                                   | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                         |                         |                       |                         | Realisasi Capaian       |            |            |            | Proyeksi                |      | Catatan Analisis |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------|------------------|
|    |                                                                                                             |     | Tahun 2017<br>(thn n-3)         | Tahun 2018<br>(thn n-2) | Tahun 2019<br>(thn n+1) | Tahun 2020<br>(thn n) | Tahun 2021<br>(thn n+1) | Tahun 2017<br>(thn n-3) | tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021<br>(thn n+1) | (thn |                  |
|    |                                                                                                             | 4   | 5                               | 6                       | 7                       |                       | 8                       | 9                       | 10         |            | 11         | 12                      |      | 13               |
|    | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Kesekretariatan DPRD                                                |     |                                 |                         |                         | 64%                   | 70%                     | 0%                      | 64.14%     | 65.04%     | 65.53%     | 70%                     |      |                  |
|    | Persentase Perda yang disahkan                                                                              |     |                                 |                         |                         | 80%                   | 85%                     | 80%                     | 80%        |            | 80%        | 85%                     |      |                  |
|    | Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan                                                              |     |                                 |                         |                         | 80%                   | 85%                     | 80%                     | 80%        |            | 80%        | 85%                     |      |                  |
|    | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi. |     |                                 |                         |                         |                       | 60%                     |                         |            |            |            | 60%                     |      |                  |
|    | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi                    |     |                                 |                         |                         |                       | 90%                     |                         |            |            |            | 90%                     |      |                  |
|    | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi          |     |                                 |                         |                         |                       | 80%                     |                         |            |            |            | 80%                     |      |                  |
|    | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan                                                |     |                                 |                         |                         |                       | 90%                     |                         |            |            |            | 90                      |      |                  |

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 bahwa di Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 65.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja oleh tim akademisi melalui metode survey dan wawancara kepada anggota DPRD di semester I dan Semester II, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2020 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 65,53 % atau mencapai 100,81% atau kategori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2020 mempunyai nilai kinerja sebesar 65,53.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD di tahun 2020 yaitu sebesar 65 telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 0,53 atau presentase capaian melebihi target sebesar 0,81%.

Untuk lebih detailnya, capaian kinerja sebesar 81,05 dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 50,08 dengan interpretasi Fasilitas Umum perlu ditingkatkan.

- a. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 54,33 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 53 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- d. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- e. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) sebesar 54,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- f. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- g. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- h. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 65,53.

Di Tahun 2022, berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020, program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota;

Diharapkan ditahun 2022 Program Utama dan Program Penunjang menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui

APBD sehingga dapat lebih menformulasikan visi dan misi kepala daerah lebih harmoni, sinergi dan terukur di setiap kinerjanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, maka dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebagaimana tabel TC 31

Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto telah sesuai.

**Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022                                                 |           |                                                                                                        |                   |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                          |           |                                                                         |                   |                | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|    | Program/<br>Kegiatan / Sub<br>Kegiatan                                         | Lokasi    | Indikator Kinerja                                                                                      | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif | Program/<br>Kegiatan<br>/Sub Kegiatan                                             | Lokasi    | Indikator<br>Kinerja                                                    | Target<br>Capaian | Kebutuhan Dana |                 |
|    |                                                                                |           |                                                                                                        |                   | (Rp.)          |                                                                                   |           |                                                                         |                   | (Rp.)          |                 |
| 1  | 2                                                                              | 3         | 4                                                                                                      | 5                 | 6              | 7                                                                                 | 8         | 9                                                                       | 10                | 11             | 12              |
| 1  | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KAB/KOTA              | MOJOKERTO | Persentase<br>Penyerapan<br>Anggaran                                                                   | 90%               | 49.619.273.607 | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KAB/KOTA                 | MOJOKERTO | Nilai SAKIP                                                             | 76,18 (BB)        | 49.619.273.607 |                 |
|    | Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | MOJOKERTO | Jumlah dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>tersusun | 6 dokumen         | 30.000.000     | Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | MOJOKERTO | Persentase<br>indicator<br>program PD<br>yang tercapai<br>sesuai target | 100 %             | 30.000.000     |                 |
|    | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                    |           | Jumlah<br>Renstra dan<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Tersusun                                 | 2 dokumen         | 15.000.000     | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                       | MOJOKERTO | Jumlah<br>Renstra dan<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Tersusun  | 2 dokumen         | 15.000.000     |                 |
|    | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                           | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen<br>Evaluasi                                                                             | 4 dokumen         | 15.000.000     | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                              | MOJOKERTO | Jumlah<br>Dokumen<br>Evaluasi                                           | 4 dokumen         | 15.000.000     |                 |
|    | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                   |           | Jumlah waktu<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat                                                  | 14 bln            | 4.291.067.815  | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                      | MOJOKERTO | Presentase<br>realisasi<br>anggaran<br>perangkat                        | 82%               | 4.291.067.815  |                 |

|  |                                                            |                    |                                                                   |                           |                      |                                                            |                    |                                                                                       |             |                      |  |
|--|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
|  |                                                            |                    | <b>Daerah tersedia</b>                                            |                           |                      |                                                            |                    | <b>daerah</b>                                                                         |             |                      |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS                          | MOJOKERTO          | Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN                           | 14 bulan                  | 4.291.067.815        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS                          | MOJOKERTO          | Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 14 bulan    | 4.291.067.815        |  |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>           |                    | <b>jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi</b> | <b>30 stel 7 kegiatan</b> | <b>700.000.000</b>   | <b>Adminis trasi Kepega waian Perangk at Daerah</b>        | <b>MOJOK ERT O</b> | <b>IP ASN</b>                                                                         | <b>80</b>   | <b>700.000.000</b>   |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     | MOJOKERTO          | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi                       | 30 stel                   | 100.000.000          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     | MOJOKERTO          | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi                                           | 30 stel     | 100.000.000          |  |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                    | Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi           | 7 kegiatan                | 600.000.000          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | MOJOKERTO          | Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi                               | 7 kegiatan  | 600.000.000          |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                  | <b>MOJ OKER TO</b> | <b>jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah terpenuhi</b>        | <b>8 paket 12 bulan</b>   | <b>3.309.664.000</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                  | <b>MOJOK ERT O</b> | <b>Presenta se penyedia an adminis trasi umum perangk at daerah sesuai kebutuha n</b> | <b>100%</b> | <b>3.309.664.000</b> |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                    | Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | 5 paket                   | 2.000.000.000        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | MOJOKERTO          | Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 5 paket     | 2.000.000.000        |  |

|  |                                                             |                   |                                                                          |                 |                      |                                                             |                       |                                                                                         |             |                      |  |
|--|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | MOJO<br>KERT<br>O | Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor                                 | 1 paket         | 99.664.000           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor                                                | 1 paket     | 99.664.000           |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   |                   | Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan                    | 1 paket         | 200.000.000          | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                   | 1 paket     | 200.000.000          |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    | MOJO<br>KERT<br>O | Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | 1 paket         | 10.000.000           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                          | 1 paket     | 10.000.000           |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   |                   | Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu                                   | 12 bulan        | 600.000.000          | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu                                                  | 12 bulan    | 600.000.000          |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | MOJO<br>KERT<br>O | Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah        | 12 bulan        | 400.000.000          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah                       | 12 bulan    | 400.000.000          |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   | <b>jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>12 bulan</b> | <b>2.500.000.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>MOJOK<br/>ERTO</b> | <b>Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b> | <b>81 %</b> | <b>2.500.000.000</b> |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | MOJO<br>KERT      | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik          | 12 bulan        | 600.000.000          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya                     | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,                                                | 12 bulan    | 600.000.000          |  |

|  |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                        |                       |                      |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                        |             |                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
|  |                                                                                                                    | O                 |                                                                                                                                        |                       |                      | Air dan Listrik                                                                                                    |                   | Air Bersih dan Listrik                                                                                                                 |             |                      |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                                                                          | 12 bulan              | 1.900.000.000        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | MOJOK ERT0        | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                                                                          | 12 bulan    | 1.900.000.000        |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>MOJOK ERT0</b> | <b>jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia</b>                                           | <b>24 unit 12 bln</b> | <b>1.358.000.000</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>MOJOK ERT0</b> | <b>Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>                                                                               | <b>81 %</b> | <b>1.358.000.000</b> |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   | Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | 24 unit               | 600.000.000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | MOJOK ERT0        | Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | 24 unit     | 600.000.000          |  |
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | MOJOK ERT0        | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara | 12 bulan              | 358.000.000          | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | MOJOK ERT0        | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara | 12 bulan    | 358.000.000          |  |

|  |                                                                                      |           |                                                                                    |                                   |                       |                                                                                      |           |                                                                                    |          |                       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--|
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |           | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                      | 12 bulan                          | 400.000.000           | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | MOJOKERTO | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                      | 12 bulan | 400.000.000           |  |
|  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                       | MOJOKERTO | <b>jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                              | <b>14 bulan, 150 stel, 50 org</b> |                       | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                       | MOJOKERTO | <b>Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi</b>            | 90 %     | <b>35.430.541.792</b> |  |
|  | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                           |           | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                  | 14 bulan                          | <b>35.845.541.792</b> | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                           | MOJOKERTO | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                  | 14 bulan | <b>35.845.541.792</b> |  |
|  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                            | MOJOKERTO | Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | 150 stel                          | 400.000.000           | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                            | MOJOKERTO | Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | 150 stel | 400.000.000           |  |
|  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                    | MOJOKERTO | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up          | 50 orang                          | 185.000.000           | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                    | MOJOKERTO | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up          | 50 orang | 185.000.000           |  |
|  | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                     | MOJOKERTO | Jumlah Waktu Layanan Administrasi DPRD                                             | 12 bln                            | 1.000.000.000         | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                     | MOJOKERTO | Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi                                 | 100%     | 1.000.000.000         |  |
|  | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                      |           | Jumlah Waktu Fasilitasi Rapat DPRD                                                 | 12 bulan                          | 1.000.000.000         | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                      | MOJOKERTO | Jumlah Waktu Fasilitas i Rapat DPRD                                                | 12 bulan | 1.000.000.000         |  |

|  |                                                                          |                  |                                                                                                            |                   |                       |                                                                          |                  |                                                                                                            |                   |                       |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
|  | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>                | <b>MOJOKERTO</b> |                                                                                                            | <b>10 dokumen</b> | <b>40.405.630.000</b> | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>                | <b>MOJOKERTO</b> |                                                                                                            | <b>10 dokumen</b> | <b>40.405.630.000</b> |  |
|  |                                                                          |                  | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | 60%               | 7.220.272.000         |                                                                          |                  | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | 60%               | 7.220.272.000         |  |
|  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                   | <b>MOJOKERTO</b> | <b>Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi</b>                                | <b>10 dokumen</b> | <b>7.220.272.000</b>  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                   | <b>MOJOKERTO</b> | <b>Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi</b>                            | <b>60%</b>        | <b>7.220.272.000</b>  |  |
|  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah           | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas                                                        | 2 dokumen         | 900.000.000           | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah           | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas                                                        | 2 dokumen         | 900.000.000           |  |
|  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                    | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas                                                                        | 4 dokumen         | 4.000.000.000         | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                    | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas                                                                        | 4 dokumen         | 4.000.000.000         |  |
|  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun                                                                | 4 dokumen         | 2.320.272.000         | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun                                                                | 4 dokumen         | 2.320.272.000         |  |
|  |                                                                          |                  | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi                   | 90%               | 5.838.788.000         |                                                                          |                  | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang                                 | 90%               | 5.838.788.000         |  |

|  |                                             |                  |                                                       |                  |                      |                                             |                  |                                                       |            |                      |  |
|--|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|
|  |                                             |                  |                                                       |                  |                      |                                             |                  | terfasilitasi                                         |            |                      |  |
|  | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>        | <b>MOJOKERTO</b> | <b>Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas</b>      | <b>6 dokumen</b> | <b>5.838.788.000</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>        | <b>MOJOKERTO</b> | <b>Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas</b>  | <b>90%</b> | <b>5.838.788.000</b> |  |
|  | Pembahasan KUA dan PPAS                     | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas              | 1 dokumen        | 1.118.408.000        | Pembahasan KUA dan PPAS                     | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas              | 1 dokumen  | 1.118.408.000        |  |
|  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | MOJOKERTO        | Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas   | 1 dokumen        | 1.118.024.000        | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | MOJOKERTO        | Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas   | 1 dokumen  | 1.118.024.000        |  |
|  | Pembahasan APBD                             | MOJOKERTO        | Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas                      | 1 dokumen        | 1.118.408.000        | Pembahasan APBD                             | MOJOKERTO        | Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas                      | 1 dokumen  | 1.118.408.000        |  |
|  | Pembahasan APBD Perubahan                   | MOJOKERTO        | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas            | 1 dokumen        | 1.118.024.000        | Pembahasan APBD Perubahan                   | MOJOKERTO        | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas            | 1 dokumen  | 1.118.024.000        |  |
|  | Pembahasan Laporan Semester                 | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester | 1 dokumen        | 247.900.000          | Pembahasan Laporan Semester                 | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester | 1 dokumen  | 247.900.000          |  |
|  | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD          | MOJOKERTO        | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas   | 1 dokumen        | 1.118.024.000        | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD          |                  | Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas   | 1 dokumen  | 1.118.024.000        |  |

|  |                                                              |                  |                                                                                                    |                                |                      |                                                              |                  |                                                                                                    |             |                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
|  |                                                              |                  | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | 80%                            | 8.168.024.000        |                                                              |                  | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | 80%         | 8.168.024.000        |  |
|  | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               | <b>MOJOKERTO</b> | <b>Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi</b>                                | <b>288 kegiatan/ 2 dokumen</b> | <b>8.168.024.000</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               | <b>MOJOKERTO</b> | <b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi</b>                            | <b>80%</b>  | <b>8.168.024.000</b> |  |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan dan Produk Hukum yang Diawasi                                  | 48 kegiatan                    | 1.500.000.000        | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan dan Produk Hukum yang Diawasi                                  | 48 kegiatan | 1.500.000.000        |  |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Bidang Infrastruktur yang Diawasi                                           | 48 kegiatan                    | 800.000.000          | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Bidang Infrastruktur yang Diawasi                                           | 48 kegiatan | 800.000.000          |  |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diawasi                       | 48 kegiatan                    | 1.500.000.000        | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diawasi                       | 48 kegiatan | 1.500.000.000        |  |
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Diawasi                               | 48 kegiatan                    | 750.000.000          | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           | MOJOKERTO        | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Diawasi                               | 48 kegiatan | 750.000.000          |  |

|  |                                                                                           |                            |                                                                          |                                                           |                      |                                                                                           |                       |                                                                          |             |                      |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
|  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi | 48 kegiatan                                               | 800.000.000          | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi | 48 kegiatan | 800.000.000          |  |
|  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi               | 1 dokumen                                                 | 400.000.000          | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi               | 1 dokumen   | 400.000.000          |  |
|  | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi                            | 48 kegiatan                                               | 1.300.000.000        | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi                            | 48 kegiatan | 1.300.000.000        |  |
|  | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas                                         | 1 dokumen                                                 | 1.118.024.000        | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas                                         | 1 dokumen   | 1.118.024.000        |  |
|  |                                                                                           |                            | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan             | 90%                                                       | 19.178.546.000       |                                                                                           |                       | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan             | 90%         | 19.178.546.000       |  |
|  | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         | <b>MOJ<br/>OKER<br/>TO</b> | <b>Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi</b>                   | <b>6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen</b> | <b>5.175.000.000</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         | <b>MOJOK<br/>ERTO</b> | <b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi</b>               | <b>90%</b>  | <b>5.175.000.000</b> |  |
|  | Bimbingan                                                                                 |                            | Jumlah Bimbingan Teknis Pimpinan                                         | 6 kegiatan                                                | 3.000.000.000        | Bimbingan Teknis                                                                          |                       | Jumlah Bimbingan                                                         | 6 kegiatan  | 3.000.000.000        |  |

|  |                                                                    |                            |                                                                                                          |                                  |                      |                                                                        |                       |                                                                                                                       |             |                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
|  | Teknis DPRD                                                        | MOJO<br>KERT<br>O          | dan Anggota DPRD<br>yang Dilaksanakan                                                                    |                                  |                      | DPRD                                                                   | MOJOK<br>ERTO         | Teknis<br>Pimpinan<br>dan Anggota<br>DPRD yang<br>Dilaksana<br>n                                                      |             |                      |  |
|  | Publikasi dan<br>Dokumentasi<br>Dewan                              | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah Waktu<br>Publikasi dan<br>Dokumentasi yang<br>Diterbitkan                                         | 12 bulan                         | 700.000.000          | Publikasi dan<br>Dokumentasi<br>Dewan                                  | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah Waktu<br>Publikasi dan<br>Dokumentasi<br>yang<br>Diterbitkan                                                   | 12 bulan    | 700.000.000          |  |
|  | Penyediaan<br>Kelompok<br>Pakar dan Tim<br>Ahli                    | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah Kelompok<br>Pakar dan Tim Ahli<br>yang Disediakan                                                 | 10 Orang                         | 100.000.000          | Penyediaan<br>Kelompok<br>Pakar dan Tim<br>Ahli                        | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah<br>Kelompok<br>Pakar dan<br>Tim Ahli yang<br>Disediakan                                                        | 10 Orang    | 100.000.000          |  |
|  | Penyediaan<br>Tenaga Ahli<br>Fraksi                                | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah Tenaga Ahli<br>Fraksi yang<br>Disediakan                                                          | 70 orang                         | 175.000.000          | Penyediaan<br>Tenaga Ahli<br>Fraksi                                    | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah<br>Tenaga Ahli<br>Fraksi yang<br>Disediakan                                                                    | 70 orang    | 175.000.000          |  |
|  | Penyusunan<br>Program Kerja<br>DPRD                                | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah dokumen<br>Program Kerja<br>DPRD yang<br>Disusun                                                  | 1 dokumen                        | 1.200.000.000        | Penyusunan<br>Program Kerja<br>DPRD                                    | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah<br>dokumen<br>Program<br>Kerja DPRD<br>yang Disusun                                                            | 1 dokumen   | 1.200.000.000        |  |
|  | <b>Penyerapan dan<br/>Penghimpunan<br/>Aspirasi<br/>Masyarakat</b> | <b>MOJ<br/>OKER<br/>TO</b> | <b>Jumlah kegiatan<br/>Penyerapan dan<br/>Penghimpunan<br/>Aspirasi<br/>Masyarakat<br/>terfasilitasi</b> | <b>1 dokumen,<br/>3 kegiatan</b> | <b>2.720.750.000</b> | <b>Penyerapan<br/>dan<br/>Penghimpunan<br/>Aspirasi<br/>Masyarakat</b> | <b>MOJOK<br/>ERTO</b> | <b>Persentase<br/>kegiatan<br/>Penyerapan<br/>dan<br/>Penghimpun<br/>an Aspirasi<br/>Masyarakat<br/>terfasilitasi</b> | <b>100%</b> | <b>2.720.750.000</b> |  |
|  | Penyusunan<br>Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD                          | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah Dokumen<br>Pokok Pikiran DPRD<br>yang tersusun                                                    | 1 dokumen                        | 50.000.000           | Penyusunan<br>Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD                              | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah<br>Dokumen<br>Pokok Pikiran<br>DPRD yang<br>tersusun                                                           | 1 dokumen   | 50.000.000           |  |
|  | Pelaksanaan<br>Reses                                               | MOJO<br>KERT<br>O          | Jumlah<br>kegiatan<br>reses terseda                                                                      | 3 kegiatan                       | 2.670.750.000        | Pelaksana<br>an Reses                                                  | MOJOK<br>ERTO         | Jumlah<br>kegiatan<br>reses terseda                                                                                   | 3 kegiatan  | 2.670.750.000        |  |

|  |                                                  |            |                                                                       |                    |                |                                                  |           |                                                                       |             |                |  |
|--|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|
|  | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        | MOJO KERTO | Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi        | 48 kegiatan        | 654.800.000    | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        | MOJOKERTO | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi    | 80%         | 654.800.000    |  |
|  | Pengawasan Kode Etik DPRD                        | MOJO KERTO | Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD                                      | 48 Kegiatan        | 654.800.000    | Pengawasan Kode Etik DPRD                        | MOJOKERTO | Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD                                      | 48 Kegiatan | 654.800.000    |  |
|  | Fasilitasi Tugas DPRD                            | MOJOKERTO  | Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi                                       | 144 keg, 1 dokumen | 10.627.996.000 | Fasilitasi Tugas DPRD                            | MOJOKERTO | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi                                   | 80%         | 10.627.996.000 |  |
|  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | MOJO KERTO | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi | 48 Kegiatan        | 5.000.000.000  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi | 48 Kegiatan | 5.000.000.000  |  |
|  | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | MOJO KERTO | Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun                     | 1 dokumen          | 1.118.024.000  | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | MOJOKERTO | Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun                     | 1 dokumen   | 1.118.024.000  |  |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | MOJO KERTO | Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi                    | 48 kegiatan        | 1.800.000.000  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | MOJOKERTO | Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi                    | 48 kegiatan | 1.800.000.000  |  |
|  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | MOJO KERTO | Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi                         | 48 kegiatan        | 2.709.972.000  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | MOJOKERTO | Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi                         | 48 kegiatan | 2.709.972.000  |  |

## 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto

| NOMOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN VOLUME | CATATAN |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
|       |                               |        |                   |                |         |
|       |                               |        |                   |                |         |
|       |                               |        |                   |                |         |
|       |                               |        |                   |                |         |
|       |                               |        |                   |                |         |
|       |                               |        |                   |                |         |
|       |                               |        |                   |                |         |
|       |                               |        |                   |                |         |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jendral DPRD RI dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat jendral DPR RI adalah unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”**.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

**“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”.**

| No. | Tujuan                                                              | Sasaran                                                              | Indikator Tujuan/Sasaran                                                                                   | Capaian 2021 | Target 2022 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1.  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik |                                                                      | IKM                                                                                                        | 70           | 71          |
|     |                                                                     | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah                   | Nilai Revormasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                 | 60           | 60          |
|     |                                                                     | Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | 60           | 60          |
|     |                                                                     |                                                                      | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi                   | 90           | 90          |
|     |                                                                     |                                                                      | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi         | 80           | 80          |
|     |                                                                     |                                                                      | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan                                               | 90           | 90          |

### **3.3. Program dan Kegiatan**

- a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
- b. Adapun program-program di tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut

#### **Program Utama :**

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Dari program tahun 2022 tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
  - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
  - 1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
  - 1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
  - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 1.2.3 Pembahasan APBD
  - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
  - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
  - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - 1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  - 1.3.2 Pelaksanaan Reses
- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - 1.4.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
  - 1.6.1 Pendalaman Tugas DPRD
  - 1.6.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - 1.6.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - 1.6.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - 1.6.5 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
  - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
  - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
  - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
  - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

## **2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
  - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 2.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material
  - 2.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 2.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 2.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 2.7 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
  - 2.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - 2.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - 2.7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 2.8 Layanan Administrasi DPRD
  - 2.8.1 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana perubahan RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 tertuang dalam Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. T-C.33**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023

OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan        | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                                                    | Rencana Tahun 2022 |                        |                               |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                 |                                                                                         | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                               | 3                                                                                       | 4                  | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
|      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>    | Nilai SAKIP                                                                             | Setwan             | 76,18 (BB)             | 49.619.273.607                | APBD        |                 | 77,48(BB)                         | 53.092.622.759                  |
|      | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun | Setwan             | 6 dokumen              | 30.000.000                    | APBD        |                 | 6 dokumen                         | 33.000.000                      |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun                                 | Setwan             | 2 dokumen              | 15.000.000                    | APBD        |                 | 2 dokumen                         | 16.500.000                      |
|      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                 | Setwan             | 4 dokumen              | 15.000.000                    | APBD        |                 | 4 dokumen                         | 16.500.000                      |
|      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                   | <b>Presentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>                                   | Setwan             | 90%                    | 4.291.067.815                 | APBD        |                 | 90%                               | 4.720.174.597                   |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS                               | Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Setwan             | 14 bulan               | 4.291.067.815                 | APBD        |                 | 14 bulan                          | 4.720.174.597                   |
|      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                | <b>IP ASN</b>                                                                           | Setwan             | 80                     | 700.000.000                   | APBD        |                 | 80                                | 770.000.000                     |
|      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya          | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi                                             | Setwan             | 30 stel                | 100.000.000                   | APBD        |                 | 30 stel                           | 110.000.000                     |
|      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan      | Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi                                 | Setwan             | 7 kegiatan             | 600.000.000                   | APBD        |                 | 7 kegiatan                        | 660.000.000                     |

|  |                                                                              |                                                                                         |               |              |                      |              |  |              |                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--|--------------|----------------------|
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan</b>        | <b>Setwan</b> | <b>80%</b>   | <b>3.309.664.000</b> | <b>APB D</b> |  | <b>80%</b>   | <b>3.640.330.400</b> |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Setwan        | 5 paket      | 2.000.000.000        | APB D        |  | 5 paket      | 2.200.000.000        |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor                                                | Setwan        | 1 paket      | 99.664.000           | APB D        |  | 1 paket      | 109.330.400          |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Setwan        | 1 paket      | 200.000.000          | APB D        |  | 1 paket      | 220.000.000          |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                          | Setwan        | 1 paket      | 10.000.000           | APB D        |  | 1 paket      | 11.000.000           |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu                                                  | Setwan        | 12 bulan     | 600.000.000          | APB D        |  | 12 bulan     | 660.000.000          |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah                       | Setwan        | 12 bulan     | 400.000.000          | APBD         |  | 12 bulan     | 440.000.000          |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b> | <b>Setwan</b> | <b>100 %</b> | <b>2.500.000.000</b> | <b>APB D</b> |  | <b>100 %</b> | <b>2.750.000.000</b> |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik                         | Setwan        | 12 bulan     | 600.000.000          | APB D        |  | 12 bulan     | 660.000.000          |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                           | Setwan        | 12 bulan     | 1.900.000.000        | APB D        |  | 12 bulan     | 2.090.000.000        |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>                                | <b>Setwan</b> | <b>100 %</b> | <b>1.358.000.000</b> | <b>APB D</b> |  | <b>100 %</b> | <b>1.493.800.000</b> |

|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |               |                   |                                   |              |  |                   |                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------------|
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Setwan        | 24 unit           | 600.000.000                       | APB D        |  | 24 unit           | 660.000.000           |
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara | Setwan        | 12 bulan          | 358.000.000                       | APB D        |  | 12 bulan          | 393.800.000           |
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                                                                          | Setwan        | 12 bulan          | 400.000.000                       | APB D        |  | 12 bulan          | 440.000.000           |
|  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                     | <b>jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                                  | <b>Setwan</b> | <b>14 bulan</b>   | <b>14 bulan, 150 stel, 50 org</b> | <b>APB D</b> |  | <b>14 bulan</b>   | <b>43.234.024.100</b> |
|  | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                                      | Setwan        | 14 bulan          | <b>35.845.541.792</b>             | APB D        |  | 14 bulan          | 37.941.817.762        |
|  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD                                                     | Setwan        | 150 stel          | 400.000.000                       | APB D        |  | 150 stel          | 440.000.000           |
|  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up                                                              | Setwan        | 50 orang          | 185.000.000                       | APB D        |  | 50 orang          | 203.500.000           |
|  | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                   | Jumlah Waktu Layanan Administrasi DPRD                                                                                                 | Setwan        | 12 bln            | 1.000.000.000                     | APB D        |  | 12 bln            | 1.100.000.000         |
|  | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | Jumlah Waktu Fasilitasi Rapat DPRD                                                                                                     | Setwan        | 12 bulan          | 1.000.000.000                     | APB D        |  | 12 bulan          | 1.100.000.000         |
|  | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                                                          |                                                                                                                                        |               | <b>10 dokumen</b> | <b>40.405.630.000</b>             |              |  | <b>10 dokumen</b> | <b>43.234.024.100</b> |
|  |                                                                                                                    | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan                                                                          |               | 60%               | 7.220.272.000                     |              |  | 60%               | <b>7.350.000.000</b>  |

|  |                                                                          |                                                                                          |               |                   |                      |              |  |                   |                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|--|-------------------|----------------------|
|  |                                                                          | Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi                                             |               |                   |                      |              |  |                   |                      |
|  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                   | <b>Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi</b>              | <b>Setwan</b> | <b>10 dokumen</b> | <b>7.220.272.000</b> | <b>APB D</b> |  | <b>10 dokumen</b> | <b>7.350.000.000</b> |
|  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah           | Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas                                      | Setwan        | 2 dokumen         | 900.000.000          | APB D        |  | 2 dokumen         | 1.000.000.000        |
|  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                    | Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas                                                      | Setwan        | 4 dokumen         | 4.000.000.000        | APB D        |  | 4 dokumen         | 4.050.000.000        |
|  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun                                              | Setwan        | 4 dokumen         | 2.320.272.000        | APB D        |  | 4 dokumen         | 2.300.000.000        |
|  |                                                                          | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi |               | 90%               | 5.838.788.000        |              |  | 90%               |                      |
|  | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                     | <b>Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas</b>                                         | <b>Setwan</b> | <b>6 dokumen</b>  | <b>5.838.788.000</b> | <b>APB D</b> |  | <b>6 dokumen</b>  | <b>6.250.000.000</b> |
|  | Pembahasan KUA dan PPAS                                                  | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas                                                 | Setwan        | 1 dokumen         | 1.118.408.000        | APB D        |  | 1 dokumen         | 1.200.000.000        |
|  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                              | Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas                                      | Setwan        | 1 dokumen         | 1.118.024.000        | APB D        |  | 1 dokumen         | 1.200.000.000        |
|  | Pembahasan APBD                                                          | Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas                                                         | Setwan        | 1 dokumen         | 1.118.408.000        | APB D        |  | 1 dokumen         | 1.200.000.000        |
|  | Pembahasan APBD Perubahan                                                | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas                                               | Setwan        | 1 dokumen         | 1.118.024.000        | APB D        |  | 1 dokumen         | 1.200.000.000        |
|  | Pembahasan Laporan Semester                                              | Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per Semester                                    | Setwan        | 1 dokumen         | 247.900.000          | APB D        |  | 1 dokumen         | 250.000.000          |

|  |                                                                                                 |                                                                                                                |               |                                        |                      |                  |  |                                             |                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------------------|----------------------|
|  | Pembahasan<br>Pertanggungjawaban APBD                                                           | Jumlah dokumen<br>Pertanggungjawaban APBD<br>yang Dibahas                                                      | Setwan        | 1 dokumen                              | 1.118.024.000        | APB<br>D         |  | 1<br>dokumen                                | 1.200.000.000        |
|  |                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan<br>tugas dan fungsi Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan yang<br>terfasilitasi |               | 80%                                    | 8.168.024.000        |                  |  | 80%                                         | <b>8.760.000.000</b> |
|  | <b>Pengawasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan</b>                                          | <b>Jumlah Pengawasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan terfasilitasi</b>                                    | <b>Setwan</b> | <b>288<br/>kegiatan/ 2<br/>dokumen</b> | <b>8.168.024.000</b> | <b>APB<br/>D</b> |  | <b>288<br/>kegiatan<br/>/ 2<br/>dokumen</b> | <b>8.760.000.000</b> |
|  | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan bidang<br>Pemerintahan dan Hukum                              | Jumlah Kegiatan Urusan<br>Pemerintahan dan Produk<br>Hukum yang Diawasi                                        | Setwan        | 48<br>kegiatan                         | 1.500.000.000        | APB<br>D         |  | 48<br>kegiatan                              | 1.600.000.000        |
|  | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Infrastruktur                                       | Jumlah Kegiatan<br>Urusan Bidang<br>Infrastruktur yang<br>Diawasi                                              | Setwan        | 48<br>kegiatan                         | 800.000.000          | APB<br>D         |  | 48<br>kegiatan                              | 860.000.000          |
|  | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Kegiatan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat yang<br>Diawasi                          | Setwan        | 48<br>kegiatan                         | 1.500.000.000        | APB<br>D         |  | 48<br>kegiatan                              | 1.600.000.000        |
|  | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian                                        | Jumlah Kegiatan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian yang Diawasi                                     | Setwan        | 48<br>kegiatan                         | 750.000.000          | APB<br>D         |  | 48<br>kegiatan                              | 800.000.000          |
|  | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang Sumber<br>Daya Alam                                    | Jumlah Kegiatan<br>Urusan Pemerintahan<br>Bidang Sumber Daya<br>Alam yang Diawasi                              | Setwan        | 48<br>kegiatan                         | 800.000.000          | APB<br>D         |  | 48<br>kegiatan                              | 850.000.000          |
|  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan Laporan Keuangan<br>oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah dokumen Temuan<br>BPK dan Rekomendasi BPK<br>yang Diawasi                                               | Setwan        | 1 dokumen                              | 400.000.000          | APB<br>D         |  | 1<br>dokumen                                | 450.000.000          |
|  | Pengawasan Penggunaan<br>Anggaran                                                               | Jumlah Kegiatan atau Proyek<br>APBD yang Diawasi                                                               | Setwan        | 48 kegiatan                            | 1.300.000.000        | APB<br>D         |  | 48<br>kegiatan                              | 1.400.000.000        |

|  |                                                                |                                                                                      |               |                                                           |                      |              |  |                                                           |                      |
|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas                                                     | Setwan        | 1 dokumen                                                 | 1.118.024.000        | APB D        |  | 1 dokumen                                                 | 1.200.000.000        |
|  |                                                                | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan                         |               | 90%                                                       | 19.178.546.000       |              |  | 90%                                                       | 20.874.024.100       |
|  | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                              | <b>Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi</b>                               | Setwan        | <b>6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen</b> | <b>5.175.000.000</b> | APB D        |  | <b>6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen</b> | 5.860.000.000        |
|  | Bimbingan Teknis DPRD                                          | Jumlah Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan                  | Setwan        | 6 kegiatan                                                | 3.000.000.000        | APB D        |  | 6 kegiatan                                                | 3.500.000.000        |
|  | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                | Jumlah Waktu Publikasi dan Dokumentasi yang Diterbitkan                              | Setwan        | 12 bulan                                                  | 700.000.000          | APB D        |  | 12 bulan                                                  | 750.000.000          |
|  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan                                   | Setwan        | 10 Orang                                                  | 100.000.000          | APB D        |  | 10 Orang                                                  | 110.000.000          |
|  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan                                            | Setwan        | 70 orang                                                  | 175.000.000          | APB D        |  | 70 orang                                                  | 200.000.000          |
|  | Penyusunan Program Kerja DPRD                                  | Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun                                       | Setwan        | 1 dokumen                                                 | 1.200.000.000        | APB D        |  | 1 dokumen                                                 | 1.300.000.000        |
|  | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>         | <b>Jumlah kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi</b> | <b>Setwan</b> | <b>1 dokumen, 3 kegiatan</b>                              | <b>.720.750.000</b>  | <b>APB D</b> |  | <b>1 dokumen, 3 kegiatan</b>                              | <b>2.755.000.000</b> |
|  | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                            | Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun                                      | Setwan        | 1 dokumen                                                 | 50.000.000           | APB D        |  | 1 dokumen                                                 | 55.000.000           |
|  | Pelaksanaan Reses                                              | Jumlah kegiatan reses terseda                                                        | Setwan        | 3 kegiatan                                                | 2.670.750.000        | APB D        |  | 3 kegiatan                                                | 2.700.000.000        |
|  | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>               | <b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi</b>                | <b>Setwan</b> | <b>48 kegiatan</b>                                        | <b>654.800.000</b>   | <b>APB D</b> |  | <b>48 kegiatan</b>                                        | <b>700.000.000</b>   |
|  | Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD                                                     | Setwan        | 48 Kegiatan                                               | 654.800.000          | APB D        |  | 48 Kegiatan                                               | 700.000.000          |

|  |                                                  |                                                                       |               |                           |                       |              |  |                           |                       |
|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------------|-----------------------|
|  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                     | <b>Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi</b>                                | <b>Setwan</b> | <b>144 keg, 1 dokumen</b> | <b>10.627.996.000</b> | <b>APB D</b> |  | <b>144 keg, 1 dokumen</b> | <b>11.559.024.100</b> |
|  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi | Setwan        | 48 Kegiatan               | 5.000.000.000         | APB D        |  | 48 Kegiatan               | 5.359.024.100         |
|  | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun                     | Setwan        | 1 dokumen                 | 1.118.024.000         | APB D        |  | 1 dokumen                 | 1.200.000.000         |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi                    | Setwan        | 48 kegiatan               | 1.800.000.000         | APB D        |  | 48 kegiatan               | 2.000.000.000         |
|  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi                         | Setwan        | 48 kegiatan               | 2.709.972.000         | APB D        |  | 48 kegiatan               | 3.000.000.000         |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya caapaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”**, ditempuh melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan misi ke 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”** dengan tujuan RPJMD. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan melalui program – program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak mempunyai penelaahan usulan program dan kegiatan yang mendukung Program Tahun 2022 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

**TABEL 4.1**  
**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**  
**SESUAI RANCANGAN RENJA 2022**

| No | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN        | UP | B/L | INDIKATOR KINERJA                                       |                                                                                                |                 |                   | LOKASI  | APBD KAB (Rp)         | APBD PROV    |           | APBN |    |          |
|----|------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------|------|----|----------|
|    |      |                                                                        |    |     | OUTPUT SUB KEGIATAN                                     | OUTPUT KEGIATAN                                                                                | OUTCOME PROGRAM | TARGET            |         |                       | SKPD Terkait | PAGU (Rp) | K/L  | Rp | D/TB/DAK |
| 1  | 2    | 3                                                                      | 4  | 5   | 6                                                       | 7                                                                                              | 8               | 9                 | 10      | 11                    | 12           | 13        | 14   | 15 | 16       |
|    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA                  |    |     |                                                         |                                                                                                | Nilai SAKIP     | <b>76,18 (BB)</b> | SET WAN | <b>49.619.273.607</b> |              |           |      |    |          |
|    |      | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |    |     |                                                         | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun</b> |                 | <b>6 dokumen</b>  | SET WAN | <b>30.000.000</b>     |              |           |      |    |          |
|    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |    |     | Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun |                                                                                                |                 | 2 dokumen         | SET WAN | 15.000.000            |              |           |      |    |          |
|    |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |    |     | Jumlah Dokumen Evaluasi                                 |                                                                                                |                 | 4 dokumen         | SET WAN | 15.000.000            |              |           |      |    |          |
|    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          |    |     |                                                         | <b>Presentase realisasi anggaran perangkat daerah</b>                                          |                 | <b>90%</b>        | SET WAN | <b>4.291.067.815</b>  |              |           |      |    |          |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS                                      |    |     | Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN                 |                                                                                                |                 | 14 bulan          | SET WAN | 4.291.067.815         |              |           |      |    |          |
|    |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                       |    |     |                                                         | <b>IP ASN</b>                                                                                  |                 | <b>80</b>         | SET WAN | <b>700.000.000</b>    |              |           |      |    |          |
|    |      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 |    |     | Jumlah Pakaian                                          |                                                                                                |                 | 30 stel           | SET WAN | 100.000.000           |              |           |      |    |          |

|  |  |                                                            |  |  |                                                                |                                                                                  |            |         |                      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                            |  |  | Dinas Pegawai yang Terpenuhi                                   |                                                                                  |            |         |                      |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |  | Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi        |                                                                                  | 7 kegiatan | SET WAN | 600.000.000          |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                  |  |  |                                                                | <b>Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan</b> | <b>80%</b> | SET WAN | <b>3.309.664.000</b> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |  | Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor       |                                                                                  | 5 paket    | SET WAN | 2.000.000.000        |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |  |  | Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor                       |                                                                                  | 1 paket    | SET WAN | 99.664.000           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |  | Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan            |                                                                                  | 1 paket    | SET WAN | 200.000.000          |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |  |  | Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                  | 1 paket    | SET WAN | 10.000.000           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |  |  | Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu                         |                                                                                  | 12 bulan   | SET WAN | 600.000.000          |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                    |  |  |                                                                                             |  |              |         |                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |  |  | Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah                           |  | 12 bulan     | SET WAN | 400.000.000          |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |  |  | <b>Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>     |  | <b>100 %</b> | SET WAN | <b>2.500.000.000</b> |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  |  | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik                             |  | 12 bulan     | SET WAN | 600.000.000          |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |  | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                               |  | 12 bulan     | SET WAN | 1.900.000.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |  | <b>Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>                                    |  | <b>100 %</b> | SET WAN | <b>1.358.000.000</b> |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan |  | 24 unit      | SET WAN | 600.000.000          |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                                                      |  |  |                                                                                                                                          |                                                       |  |                 |         |                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------|---------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                      |  |  | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                       |                                                       |  |                 |         |                                   |  |  |  |  |  |
|  |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |  | Jumlah Waktu Pemeliharaan n Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara |                                                       |  | 12 bulan        | SET WAN | 358.000.000                       |  |  |  |  |  |
|  |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | Jumlah Waktu Pemeliharaan n Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik                                                                          |                                                       |  | 12 bulan        | SET WAN | 400.000.000                       |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                       |  |  |                                                                                                                                          | <b>jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b> |  | <b>14 bulan</b> | SET WAN | <b>14 bulan, 150 stel, 50 org</b> |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                           |  |  | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                                        |                                                       |  | 14 bulan        | SET WAN | 35.845.541.792                    |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                            |  |  | Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD                                                       |                                                       |  | 150 stel        | SET WAN | 400.000.000                       |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                                |  |  |                                                                           |                                                                                                            |                   |         |                       |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                              |  |  | Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up |                                                                                                            | 50 orang          | SET WAN | 185.000.000           |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                               |  |  |                                                                           | Jumlah Waktu Layanan Administrasi DPRD                                                                     | 12 bln            | SET WAN | 1.000.000.000         |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                |  |  | Jumlah Waktu Fasilitasi Rapat DPRD                                        |                                                                                                            | 12 bulan          | SET WAN | 1.000.000.000         |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>      |  |  |                                                                           |                                                                                                            | <b>10 dokumen</b> | SET WAN | <b>40.405.630.000</b> |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                |  |  |                                                                           | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | 60%               | SET WAN | 7.220.272.000         |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>         |  |  |                                                                           | <b>Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi</b>                                | <b>10 dokumen</b> | SET WAN | <b>7.220.272.000</b>  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |  |  | Jumlah dokumen Program Rancangan                                          |                                                                                                            | 2 dokumen         | SET WAN | 900.000.000           |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                                          |  |  |                                                                                          |                                                  |  |                  |         |                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                                          |  |  | Perda yang Dibahas                                                                       |                                                  |  |                  |         |                      |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                    |  |  | Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas                                                      |                                                  |  | 4 dokumen        | SET WAN | 4.000.000.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik |  |  | Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun                                              |                                                  |  | 4 dokumen        | SET WAN | 2.320.272.000        |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                          |  |  | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi |                                                  |  | 90%              | SET WAN | 5.838.788.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                     |  |  |                                                                                          | <b>Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas</b> |  | <b>6 dokumen</b> | SET WAN | <b>5.838.788.000</b> |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan KUA dan PPAS                                                  |  |  | Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas                                                 |                                                  |  | 1 dokumen        | SET WAN | 1.118.408.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                              |  |  | Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas                                      |                                                  |  | 1 dokumen        | SET WAN | 1.118.024.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan APBD                                                          |  |  | Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas                                                         |                                                  |  | 1 dokumen        | SET WAN | 1.118.408.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan APBD Perubahan                                                |  |  | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas                                               |                                                  |  | 1 dokumen        | SET WAN | 1.118.024.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan Laporan Semester                                              |  |  | Jumlah                                                                                   |                                                  |  | 1                | SET     | 247.900.000          |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                              |  |  |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                  |            |                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                              |  |  | dokumen<br>Laporan<br>APBD yang<br>Dibahas per<br>Semester                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                   | doku<br>men                                      | WAN        |                      |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |  |  | Jumlah<br>dokumen<br>Pertanggung<br>jawaban<br>APBD yang<br>Dibahas                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 1<br>doku<br>men                                 | SET<br>WAN | 1.118.024.000        |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                              |  |  |                                                                                         |                                                                                                         | Persentas<br>e<br>Pelaksana<br>an tugas<br>dan<br>fungsi<br>Pengawas<br>an<br>Penyelen<br>ggaran<br>Pemerint<br>ahan<br>yang<br>terfasilita<br>si | 80%                                              | SET<br>WAN | 8.168.024.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               |  |  |                                                                                         | <b>Jumlah<br/>Pengawas<br/>an<br/>Penyeleng<br/>garaan<br/>Pemerinta<br/>han<br/>terfasilitas<br/>i</b> |                                                                                                                                                   | <b>288<br/>kegiat<br/>an/ 2<br/>doku<br/>men</b> | SET<br>WAN | <b>8.168.024.000</b> |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum |  |  | Jumlah<br>Kegiatan<br>Urusan<br>Pemerintah<br>an dan<br>Produk<br>Hukum yang<br>Diawasi |                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 48<br>kegiat<br>an                               | SET<br>WAN | 1.500.000.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |  |  | Jumlah<br>Kegiatan<br>Urusan<br>Bidang<br>Infrastruktur<br>yang<br>Diawasi              |                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 48<br>kegiat<br>an                               | SET<br>WAN | 800.000.000          |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                                                           |  |  |                                                                              |                                                    |     |             |         |                |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|---------|----------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |  |  | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diawasi |                                                    |     | 48 kegiatan | SET WAN | 1.500.000.000  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |  |  | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Diawasi         |                                                    |     | 48 kegiatan | SET WAN | 750.000.000    |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |  |  | Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang Diawasi     |                                                    |     | 48 kegiatan | SET WAN | 800.000.000    |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |  |  | Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi                   |                                                    |     | 1 dokumen   | SET WAN | 400.000.000    |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |  |  | Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi                                |                                                    |     | 48 kegiatan | SET WAN | 1.300.000.000  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |  |  | Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas                                             |                                                    |     | 1 dokumen   | SET WAN | 1.118.024.000  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |  |  |                                                                              | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai | 90% |             | SET WAN | 19.178.546.000 |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                        |  |  |                                                                     |                                                        |  |                                                           |         |                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                        |  |  |                                                                     | Peraturan                                              |  |                                                           |         |                      |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                      |  |  |                                                                     | <b>Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi</b> |  | <b>6 keg, 12 bln, 10 pakar, 70 tenaga ahli, 1 dokumen</b> | SET WAN | <b>5.175.000.000</b> |  |  |  |  |  |
|  |  | Bimbingan Teknis DPRD                                  |  |  | Jumlah Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan |                                                        |  | 6 kegiatan                                                | SET WAN | 3.000.000.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                        |  |  | Jumlah Waktu Publikasi dan Dokumentasi yang Diterbitkan             |                                                        |  | 12 bulan                                                  | SET WAN | 700.000.000          |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                 |  |  | Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan                  |                                                        |  | 10 Orang                                                  | SET WAN | 100.000.000          |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                          |  |  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan                           |                                                        |  | 70 orang                                                  | SET WAN | 175.000.000          |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyusunan Program Kerja DPRD                          |  |  | Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun                      |                                                        |  | 1 dokumen                                                 | SET WAN | 1.200.000.000        |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> |  |  |                                                                     | <b>Jumlah kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan</b>     |  | <b>1 dokumen, 3 kegiatan</b>                              | SET WAN | <b>.720.750.000</b>  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                  |  |  |                                                                       |                                                                       |                           |         |                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                  |  |  | Aspirasi Masyarakat terfasilitasi                                     |                                                                       |                           |         |                       |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD              |  |  | Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun                       |                                                                       | 1 dokumen                 | SET WAN | 50.000.000            |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pelaksanaan Reses                                |  |  | Jumlah kegiatan reses terseda                                         |                                                                       | 3 kegiatan                | SET WAN | 2.670.750.000         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b> |  |  |                                                                       | <b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi</b> | <b>48 kegiatan</b>        | SET WAN | <b>654.800.000</b>    |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengawasan Kode Etik DPRD                        |  |  | Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD                                      |                                                                       | 48 Kegiatan               | SET WAN | 654.800.000           |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                     |  |  |                                                                       | <b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi</b> | <b>144 keg, 1 dokumen</b> | SET WAN | <b>10.627.996.000</b> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |  |  | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi |                                                                       | 48 Kegiatan               | SET WAN | 5.000.000.000         |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  |  |  | Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun                     |                                                                       | 1 dokumen                 | SET WAN | 1.118.024.000         |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                               |  |  |                                                   |  |  |             |         |               |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|--|--|-------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah |  |  | Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terasilitasi |  |  | 48 kegiatan | SET WAN | 1.800.000.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                |  |  | Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terasilitasi      |  |  | 48 kegiatan | SET WAN | 2.709.972.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |                                               |  |  |                                                   |  |  |             |         |               |  |  |  |  |  |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini merupakan serangkaian kerangka kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai tujuan dan sasaran Renstra SKPD yang terbagi dalam 2 Program, 15 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pejabat/Staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan terarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2022 yang selanjutnya ditetapkan Renja Tahun 2022 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**MARDIASIH, SH, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP.196404051997032002